

LAMPIRAN

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas nama :

Nama : Tito Sabastian Irianto
Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum/Fakultas Hukum
NIM : 20140610229
Judul : PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM PENGURANGAN RESIKO
BENCANA BANJIR DI KECAMATAN IMOIRI
Dosen Pembimbing : Sunarno, S.H.,M.Hum

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan tingkat similaritasnya sebesar **18%**.
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ka.Ur. Pengolahan dan Layanan



Laela Niswatin, S.I.Pust.

Yogyakarta, 2018-08-16
yang melaksanakan pengecekan



Ikram Al-Zein, S.Kom.I.



Data Korban Kejadian Banjir dan longsor 28-29 November 2017

No	Nama	L/P	Umur	Lokasi				Kondisi		Keterangan
				Kecamatan	Desa	Dusun	RT	L/M		
1	Sogiran	L	80	Imogiri	Wukirsari	Karangasem	1	Meninggal	terkena longsor	
2	Sri Astuti	P	59	Sedayu	Argomulyo	Pedes	3	Meninggal	kerobohan tembok rumah karena hujan deras	
3	Wakiyem	P	70	Imogiri	Sriharjo	Sungapan	1	Meninggal	hanyut terbawa arus	
4	Samiyem	P	60	Imogiri	Sriharjo	Sungapan	1	Luka	cidera dirawat di Nurhidayah	
5	Parjimah	P	90	Kretek	Tirtohargo	Gergunung		Luka	patah lengan dirawat di RSPS	

Sumber : BPBD BANTUL 2017

PEDOMAN WAWANCARA

A. Camat Imogiri

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap risiko bencana, dan siapa saja yang arus bertanggungjawab dalam hal pengawasan tersebut?
2. Aksi apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani resiko bencana?
3. Apakah warga masyarakat di sekitar kawasan rawan bencana telah memiliki pengathuan dan wawasan terkait dengan tata cara penanganan risiko bencana?

B. Sekretaris Camat Imogiri

1. Bagaimana bentuk kapasitas masyarakat di kecamatan Imogiri dalam upaya mengurangi resiko bencana?
2. Apa yang dimaksud dengan pelaksanaan gladi lapangan?
3. Apa tujuan pelaksanaan penyusunan dokumen manajemen bencana?

C. Staff Pengendalian Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

- Apa peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam hal pengawasan kawasan resiko bencana?

D. Staff Pusat Pengendalian Operasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

- Apa peranan pengawaan dan tanggungjawab yang dilakukan oleh BPBD?

E. Kasi Kesiapsiagaan Bidang Penanggulangan Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

1. Bagaimana bentuk kapasitas masyarakat di kecamatan Imogiri dalam upaya mengurangi resiko bencana ?

2. Apa yang dimaksud dengan pelaksanaan gladi lapangan ?
3. Apa tujuan pelaksanaan penyusunan dokumen manajemen bencana ?
4. Apa yang dimaksud dengan rencana kontijensi terkait dengan penanganan resiko bencana?

F. Staff Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Sumber Daya Alam di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

1. Bagaimana bentuk kapasitas masyarakat di kecamatan Imogiri dalam upaya mengurangi resiko bencana ?
2. Apa yang dimaksud dengan rencana kontijensi terkait dengan penanganan resiko bencana ?

G. Warga

1. Bagaimana bentuk kapasitas masyarakat di kecamatan Imogiri dalam upaya mengurangi resiko bencana ?
2. Aksi apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani resiko bencana ?
3. Apa yang dimaksud dengan pelaksanaan gladi lapangan ?
4. Apa yang dimaksud dengan rencana kontijensi terkait dengan penanganan resiko bencana ?
5. Apa peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam hal pengawasan kawasan resiko bencana ?
6. Apa tujuan pelaksanaan penyusunan dokumen manajemen bencana ?
7. Apakah warga masyarakat di sekitar kawasan rawan bencana telah memiliki pengathuan dan wawasan terkait dengan tata cara penanganan risiko bencana ?

TRANSKRIP WAWANCARA

A. Wawancara dengan Sigit Subroto selaku Camat Imogiri (Tanggal 2 Juli 2018)

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap risiko bencana, dan siapa saja yang arus bertanggungjawab dalam hal pengawasan tersebut?

Jawab :

Pengawasan dalam penanganan risiko bencana dilakukan oleh berbagai instansi dan saling berkoordinasi. Salah satunya oleh Dinas Lingkungan Hidup yang melakukan pengawasan terkait dengan pengurangan risiko bencana dalam konteks pemanfaatan lahan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemanfaatan lahan dikawasan rawan bencana dapat ditata dengan baik, sehingga bencana banjir dapat diminimalisir.

2. Aksi apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani resiko bencana?

Jawab :

Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk rencana aksi daerah dalam mengurangi risiko bencana yang disusun dengan dikordinasi oleh badan penanggulangan daerah dengan melibatkan instansi atau lembaga yang terkait dalam pengurangan risiko bencana. Rencana aksi daerah disusun untuk dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun serta dapat ditinjau kembali apabila terjadi bencana. Setelah rencana aksi daerah tersusun maka rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan dengan peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

3. Apakah warga masyarakat di sekitar kawasan rawan bencana telah memiliki pengathuan dan wawasan terkait dengan tata cara penanganan risiko bencana?

Jawab :

Warga yang berada disekitar kawasan rawan benacana saat ini sudah mulai memiliki kualitas dalam menghadapi bencana. Dusun yang berada di sekitar wilayah rawan bencana sudah mulai mandiri dengan adanya desa tangguh bencana (destana) dan pemerintah menyediakan hunian tetap atau hunian sementara bagi warga yang tempat tinggalnya sangat dekat dengan wilayah rawan bencana. Selain itu salah satu desa di wilayah rawan bencana memiliki tanah kas desa yang berfungsi di jadikan tempat darurat apabila terjadi bencana. Tanah kas desa yang diurus dengan para pemuda desa setempat dan saat ini telah di bangu hunian tetap serta sport center bagi warganya.

B. Wawancara dengan Triyanto selaku Sekretaris Camat Imogiri (Tanggal 4 Juli 2018)

1. Bagaimana bentuk kapasitas masyarakat di kecamatan Imogiri dalam upaya mengurangi resiko bencana?

Jawab :

Peningkatan kapasitas masyarakat di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul dalam upaya mengurangi risiko bencana adalah dengan memasukkan PRB ke dalam RPJM desa. Sebagai sebuah alat perencanaan pembangunan resmi pemerintah, RPJM Desa ini dapat dipandang sebagai media strategis untuk mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pemerintah desa selama 5 (lima) tahun. Perencanaan pembangunan inilah yang menghasilkan output langsung berupa program dan anggaran publik.

2. Apa yang dimaksud dengan pelaksanaan gladi lapang?

Jawab :

Gladi lapangan ini adalah sebagai perencanaan, identifikasi sumber daya, sistem peringatan dan pelatihan, simulasi, dan tindakan pra bencana lainnya yang diambil untuk tujuan utama meningkatkan keamanan dan efektifitas respons masyarakat selama bencana.

3. Apa tujuan pelaksanaan penyusunan dokumen manajemen bencana?

Jawab :

Penyusunan dokumen manajemen bencana bertujuan untuk mengantisipasi terjadi suatu bencana, sehingga baik pemerintah maupun instansi lainnya telah memiliki persiapan yang baik, serta tanggap bencana yang setiap saat dapat terjadi.

C. Wawancara dengan Iwan Budiyanto selaku Staff Pengendalian Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul (Tanggal 6 Juli 2018)

- Apa peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam hal pengawasan kawasan resiko bencana?

Jawab :

Kami di Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran dalam hal pengawasan tata guna lahan, khususnya lahan rawan bencana yang sudah dipetakan oleh BPBD/BPBP, tugas kami adalah memastikan bahwa lahan sesuai dengan peruntukannya, sehingga resiko bencana dapat diminimalisir sejak dini.

D. Wawancara dengan Amin Murtaji selaku Staff Pusat pengendalian Operasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul (Tanggal 5 Juli 2018)

- Apa peranan pengawasan dan tanggungjawab yang dilakukan oleh BPBD?

Jawab :

Pengawasan yang dilakukan BPBD dikhususkan dalam hal pemetaan wilayah rawan bencana, selain itu BPBD Kabupaten Bantul melakukan pengawasan dalam lokasi terdampak bencana karena mereka yang menjadi ujung tombak penanggulangan bencana. Hampir 100% kegiatan penanggulangan bencana banjir.

E. Wawancara dengan Bapak Setyo selaku Kasi Kesiapsiagaan Bidang Penanggulangan Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul (Tanggal 3 Juli 2018)

1. Bagaimana bentuk kapasitas masyarakat di kecamatan Imogiri dalam upaya mengurangi resiko bencana ?

Jawab :

Peningkatan kapasitas masyarakat, diantaranya melalui (1). Kajian dan Pemetaan Risiko Bencana (2). Penyusunan Dokumen Kebencanaan (RPB, RAK, Renkon), (3). Edukasi atau pendidikan Kebencanaan kepada kelompok rentan (anak, perempuan dan petani) 4). Sosialisasi kebencanaan melalui berbagai event kegiatan (keagamaan/pengajian, peringatan hari nasional, seni budaya) (5). Integrasi antar kegiatan pembangunan melalui Musrenbangdes. (6). Pembentukan tim relawan pada setiap dusun. Berbagai kegiatan peningkatan kapasitas tersebut diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat untuk lebih memahami kondisi lingkungan desa yang rawan bencana, sehingga dapat mempersiapkan diri bilamana bencana datang.

2. Apa yang dimaksud dengan pelaksanaan gladi lapangan ?

Jawab :

Tahapan pelatihan juga merupakan salah satu tahapan yang paling penting khususnya gladi lapangan ini. Gladi lapangan ini dilakukan agar masyarakat tahu apa yang harus dilakukan pada saat bencana terjadi. Dengan pelatihan, masyarakat menjadi mengerti dan dapat melakukan hal yang tepat disaat terjadinya bencana. Pada tahapan penyuluhan inilah BPBD berkesempatan memberikan pengetahuan kepada mereka terhadap ancaman bencana yang berada didepan mereka sehingga ketika mereka dilibatkan dalam pelatihan, mereka sudah mampu dan mengerti apa yang harus dilakukan.

3. Apa tujuan pelaksanaan penyusunan dokumen manajemen bencana ?

Jawab :

Penyusunan dokumen manajemen bencana dilaksanakan pada akhir masa tanggap darurat dan masa pemulihan awal dengan memperhatikan: hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana; penentuan prioritas; pengalokasian sumberdaya dan waktu pelaksanaan; dokumen rencana kerja pemerintah baik pusat maupun daerah; dan dokumen perencanaan pembangunan terkait lainnya, penyusunan dokumen tersebut bertujuan untuk meminimalisir dampak bencana banjir yang dapat terjadi setiap saat di Kabupaten Bantul, khususnya pada musim penghujan.

4. Apa yang dimaksud dengan rencana kontijensi terkait dengan penanganan resiko bencana?

Jawab :

Rencana kontijensi merupakan suatu rencana yang telah dirancang pada keadaan yang dapat dibayangkan tidak tetap dengan jalan atau alur yang telah disepakati, teknik, manajemen dan berbagai pelaksanaan yang telah ditetapkan secara bersama dengan berbagai penanggulangan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perencanaan tersebut ada karena keadaan yang darurat. Rencana kontijensi pada dasarnya merupakan proses indentifikasi dan berbagai penyusunan rencana yang dapat didasarkan pada kondisi kontijensi yang ada.

F. Wawancara dengan Sumarjo selaku Staff Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Sumber Daya Alam di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul (Tanggal 6 Juli 2018)

1. Bagaimana bentuk kapasitas masyarakat di kecamatan Imogiri dalam upaya mengurangi resiko bencana ?

Jawab :

Peningkatan kapasitas masyarakat dilakukan melalui: (1) Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam manajemen risiko bencana; dan (2) Meningkatkan pembinaan tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang sadar terhadap risiko bencana. Pendidikan latihan kesiapsiagaan pada dasarnya untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat dalam penanganan bencana secara cepat dan tepat serta dapat meminimalisasi penderitaan korban bencana. Pendidikan yang telah diselenggarakan oleh BPBD Kabupaten Bantul merupakan pelatihan khusus untuk tenaga penyelamatan tentang *surviving*, pertolongan pertama, serta penanganan kondisi kedaruratan di Kabupaten Bantul.

2. Apa yang dimaksud dengan rencana kontijensi terkait dengan penanganan resiko bencana ?

Jawab :

Rencana kontijensi dalam sistim penanggulangan bencana, rencana kontijensi, dilaksanakan pada saat telah terjadinya gejala bencana, seperti prediksi dari pakar geologi yang memprediksi akan terjadi bencana , oleh karena itu rencana kontijensi sudah harus dilakukan pada.

G. Wawancara dengan Warga

Wawancara dengan Jumatno, Warga Imogiri (Tanggal 9 Juli 2018)

1. Bagaimana bentuk kapasitas masyarakat di kecamatan Imogiri dalam upaya mengurangi resiko bencana ?

Jawab :

Peningkatan kapasitas masyarakat di Imogiri mengenai upaya pengurangan risiko bencana alam yang sering terjadi adalah dengan memasukkan PRB ke dalam RPJM desa. Hal ini dipandang sebagai strategi yang sangat baik dalam pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pemerintah desa.

3. Aksi apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani resiko bencana ?

Jawab :

Memang sudah ada perencanaan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dengan dikordinasi oleh badan penanggulangan daerah dengan melibatkan instansi dan lembaga yang terkait dalam pengurangan risiko bencana alam. Bukan hanya itu saja, pemerintah juga melakukan perencanaan aksi yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana alam yang sering terjadi.

Wawancara dengan Paimin, Warga Imogiri (Tanggal 8 Juli 2018)

1. Apa yang dimaksud dengan pelaksanaan gladi lapangan ?

Jawab :

Gladi lapangan memang perlu dilakukan supaya warga masyarakat lebih tahu tentang langkah apa saja jika bencana terjadi sehingga warga masyarakat juga dapat melakukan tindakan yang tepat disaat terjadinya bencana. Jadi saya sebagai warga masyarakat Imogiri juga bisa lebih mengerti mengenai antisipasi apa saja yang perlu saya lakukan di saat di daerah saya terjadi bencana.

2. Apa yang dimaksud dengan rencana kontijensi terkait dengan penanganan resiko bencana ?

Jawab :

Rencana kontijensi merupakan suatu sistem perencanaan yang matang mengenai langkah-langkah apa saja yang dilakukan bila terjadi bencana yang dapat didasarkan pada kondisi kontijensi yang ada saat ini khususnya di Imogiri.

Wawancara dengan Wakimin, Warga Imogiri (Tanggal 8 Juli 2018)

1. Apa peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam hal pengawasan kawasan resiko bencana ?

Jawab :

Memang sudah ada tindakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup diantaranya pemanfaatan tata guna lahan yang berada di kawasan rawan bencana yang ada di daerah saya ini. Sebagai warga masyarakat, saya senang dengan adanya tindakan tersebut, karena bencana yang ada di daerah saya ini sedikit demi sedikit sudah bisa teratasi.

2. Apa tujuan pelaksanaan penyusunan dokumen manajemen bencana ?

Jawab :

Memang sudah ada dari aparat desa yang bertugas menyusun dokumen manajemen bencana mengenai tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi bila terjadi bencana alam. Dengan begitu kan sudah ada perencanaan yang matang bila bencana terjadi di daerah saya ini.

3. Apakah warga masyarakat di sekitar kawasan rawan bencana telah memiliki pengathuan dan wawasan terkait dengan tata cara penanganan risiko bencana ?

Jawab :

Warga masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana saat ini lebih sigap dan aktif bila terjadi bencana karena mereka sudah diberikan pengetahuan mengenai hal-hal apa saja yang perlu dilakukan bila terjadi bencana.

FOTO-FOTO DOKUMENTASI LAPANGAN



Handy Talky



Balai Desa Kebun Agung Sebagai Barak Pengungsian



Bendungan tegal yang jebol mengakibatkan banjir di kecamatan Imogiri





Kondisi Jembatan yang Rusak Akibat Banjir di Daerah Imogiri